

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dari sektor publik yang semakin pesat menurut pemerintah agar melaksanakan tugas tanggung jawabnya, dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan pelayanan publik (Abdul: 2007).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dan dengan rencana kerja serta menunjukkan efektivitas dengan tindakan dalam mencapai tujuan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat di tolak ukur keberhasilan karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus di ukur dengan kinerjanya (Irvan: 2013).

Pemerintah daerah adalah lembaga yang melaksanakan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan cara bekerja dengan professional sehingga menghasilkan suatu kinerja yang diharapkan masyarakat, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kinerja pemerintah harus dipantau karena berkaitan dengan anggaran daerah . supaya kinerja tersebut menjadi kenyataan dan sukses,.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga pemerintahan daerah yang melalui proses perencanaan penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas pertanggung jawaban proses penganggaran mulai dari perencanaan penyusunan dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Pengelolaan keuangan publik juga diperlukan, dalam arti bahwa yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah

merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar. Hal itu berarti bertambah pula urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah terutama berkenaan dengan penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Hal tersebut akan memperlihatkan bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta bagaimana kinerja yang mereka hasilkan. Kinerja merupakan penentuan efektifitas operasional pada suatu waktu tertentu dalam organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja pengelola keuangan tergantung pada kemampuan staf / pegawai untuk menyusun laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan daerah, salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi adalah sistem akuntansi.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem akuntansi keuangan daerah. karena baik buruknya laporan keuangan salah satunya dapat dilihat melalui sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana (Superdi, 2017). Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah (Lily, 2015).

Dari informasi cakrawala daerah Pemkot Jatim dan seluruh pemkab/pemkot telah menerima penghargaan (SAKIP) dari 38 pemkot di Jawa Timur. Jember tak raih predikat A penghargaan Sakip mulai dari 3 tahun sebelumnya yang ditargetkan di tahun 2019 hanya tetap bertahan pada posisi predikat B sama dengan tahun 2018

**Tabel 1.1**  
**Sakip Jember**

| No | Tahun | Predikat |
|----|-------|----------|
| 1  | 2017  | CC       |
| 2  | 2018  | B        |
| 3  | 2019  | B        |

**Cakrawala Daerah Pemkot Jatim**

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu maka penulis tertarik "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan sistem akuntansi keuangan

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember)”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan hasil penjelasan latar belakang masalah di atas , maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah terdapat pengaruh akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris:

1. pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi pemerintahan Kabupaten Jember, Dengan melihat hasil pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah sebagai masukan dalam penentuan Hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik sama.
2. Bagi Universitas, Sebagai salah satu bentuk Sebagai unsur tambahan untuk menambahkan wawasan mahasiswa, mempererat hubungan antara Universitas Muhammadiyah Jember dengan pemerintahan Kabupaten Jember.